

Penguatan Keterlibatan Warga Negara Di Era Globalisasi Melalui Sosialisasi Politik

Mawar Pita Oktavia^{1,a*}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ mawaroktavia@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 28 Mei 2024;

Revised: 13 Juni 2024;

Accepted: 23 Juni 2024.

Kata-kata kunci:

Keterlibatan Warga Negara; Globalisasi; Sosialisasi Politik.

ABSTRAK

Menghadapi era globalisasi harus disertai dengan penguatan pendidikan karakter bagi generasi muda untuk menangkal dekadensi moral. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, akan membangun, membentuk, dan membina karakter generasi muda sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa sesuai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam mencapai tujuan pendidikan watak dan perilaku tersebut diperlukan upaya pembiasaan melalui internalisasi dan aplikasi dari civic knowledge, civic values maupun civic skill. Ketiga kompetensi tersebut akan sinergis dapat dicapai apabila setiap individu sebagai warga negara sudah memiliki hal yang tercermin dalam kehidupan komunitasnya. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur, penulis mencoba meneliti bagaimana peran sosialisasi politik di era globalisasi saat ini, hingga mencapai kesimpulan bahwa di era globalisasi saat sosialisasi politik masih mempunyai peran yang amat penting didalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna membangun pemahaman global bagi generasi muda khususnya sebagai bekal dasar dalam berinteraksi didalam masyarakat internasional.

ABSTRACT

Strengthening Citizen Involvement in the Era of Globalization Through Political Socialization. Facing the era of globalization must be accompanied by strengthening character education for the younger generation to ward off moral decadence. Through Citizenship Education, it will build, form, and foster the character of the younger generation in accordance with the noble values of the nation in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In achieving these character and behavior education goals, habituation efforts are needed through internalization and application of civic knowledge, civic values as well as civic skills. These three competencies can be achieved synergistically if each individual as a citizen already has things that are reflected in the life of his community. In this study the authors used qualitative research methods through literature studies, the authors tried to examine how the role of political socialization in the current era of globalization, to reach the conclusion that in the era of globalization when political socialization still has a very important role in the life of the nation and state in order to build understanding global for the younger generation in particular as a basic provision in interacting in the international community.

Keywords:

Civic Engagement;

Globalization;

Political Socialization.

Copyright © 2024 (Mawar Pita Oktavia). All Right Reserved

How to Cite : Oktavia, M. P. (2024). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Di Era Globalisasi Melalui Sosialisasi Politik. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(6), 200–207. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i6.2084>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini dengan adanya saling keterbukaan dan ketergantungan antar negara menjadikan negara tidak mengenal batas-batasnya sehingga arus informasi dan telekomunikasi pun berkembang sangat pesat maka persaingan Internasional pun akan semakin ketat didalam masyarakat internasional. Masyarakat internasional terdiri dari sejumlah negara- negara di dunia yang sederajat dan merdeka yang mempunyai kepentingan-kepentingan untuk melakukan hubungan secara tetap dan terus-menerus. Hubungan internasional timbul karena adanya faktor saling membutuhkan antar negara dalam berbagai kepentingan, misalnya kepentingan politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, sosial dan masih banyak lagi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat internasional yang dapat dijadikan dasar atau menimbulkan hubungan antar negara (Yustitiantingtyas, 2015). Khususnya bagi Indonesia era globalisasi ini tidak hanya mengarah pada kepentingan dalam negeri akan tetapi juga mengarah pada kepentingan global (Anggraeni et al., 2020).

Globalisasi yang terjadi diseluruh dunia membuat kemajuan di bidang teknologi terus berkembang. Kemajuan teknologi khususnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan dunia yang tanpa batas. Saat ini berbagai persoalan di suatu negara dapat dengan cepat dan mudah diketahui oleh orang-orang di luar negara tersebut. Dengan bantuan internet, informasi dapat mengalir dengan cepat ke seluruh penjuru dunia dan memudahkan masyarakat untuk mnegakses informasi tanpa di batasi oleh waktu dan tempat. Tantangan baru yang harus di hadapi setiap negara pun timbul sebagai akibat dari dunia yang tanpa batas di era globalisasi ini (Murdiono, 2014). Kemajuan teknologi informasi yang datang terus-menerus akhirnya berdampak pada kehidupan penduduk di seluruh dunia lewat semakin intensnya interaksi masyarakat internasional.

Jika kita melihat peluang yang dimiliki oleh negara berkembang khususnya Indonesia, sebagai berikut: (1) Dapat hidup di dalam dunia yang lebih terbuka atau dunia yang tanpa batas; (2) dapat mengadopsi dan menerapkan inovasi yang datang dari luar untuk meningkatkan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia; (3) dapat menjadikan masyarakat indonesia memiliki pola pikir global dan pola tindak kompetitif, suka bekerja keras, memiliki etos kerja, kreatif, mau belajar untuk meningkatkan keterampilan dan prestasi kerja; (4) terjadinya perdagangan bebas yang makin meningkatkan kerjasama regional misalnya MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) memerlukan manusia-manusia yang berkualitas tinggi; (5) meningkatkan peluang baru bagi pembangunan ekonomi di Indonesia; (6) Meningkatkan SDM Indonesia yang berkualitas tinggi untuk bersaing dalam kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Maka dibutuhkanlah semangat nasionalisme warga negara Indonesia guna memaksimalkan peluang yang ada di era globalisasi yang kian pesat.

Berdasarkan hasil survey Developing Countries Studies Center (DCSC) Indonesia tentang semangat nasionalisme. Disebutkan bahwa 83,3 % responden mengaku bangga sebagai orang Indonesia. Sementara 5,5% mengatakan tidak bangga dan sisanya 11,2% menjawab tidak tahu. Namun, jika dibandingkan dengan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada tahun yang sama menandakan penurunan. Dimana sebanyak 92,1% menjawab bangga sebagai orang Indonesia, 4,2% mengatakn tidak bangga dan sisanya 3,7% menjawab tidak tahu.

Pendidikan adalah salah satu media untuk menanamkan nilai dan merubah nilai yang ada di dalam masyarakat (*change of value*). Sebagai wahana perubahan nilai melalui program pendidikan formal, nonformal dan informal, pendidikan memerlukan perangkat pengalaman belajar (*learning experiences*), seperti kurikulum/ program belajar dan pembelajaran yang secara programatik dapat memandu terjadinya proses pengembangan cita-cita, nilai, konsep dan prinsip belajar memberi pelayanan. Untuk itu diperlukan upaya sistematis dan sistemik untuk merancang kurikulum dan pembelajaran yang secara konseptual menjadi wahana pendidikan dalam konteks pembangunan masyarakat yang bekarakter.

Maka disinilah peran sosialisasi politik dalam meningkatkan semangat nasionalisme setiap warga negara sehingga nantinya warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya di era globalisasi secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (Paramitha et al., 2021). “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” dan “membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial”.

Sosialisasi Politik selayaknya dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai, yang memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam berbagai dimensi kehidupan sehingga dapat membentuk sikap peduli (*respect*). Dengan sosialisasi politik diharapkan dapat membentuk budaya kewarganegaraan yang lebih peduli (*respect*). Salah satu unsur dari budaya kewarganegaraan adalah “civic virtue” atau kebajikan atau akhlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan. Semua unsur akhlak kewarganegaraan itu diyakini akan berpengaruh dalam membentuk warga negara yang baik (to be good citizenship), sehingga akan memupuk kehidupan “civic community” atau “civil society” atau masyarakat madani untuk Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keterlibatan warga negara (*civic engagement*) dalam *community civic* sebagai pemecahan masalah lingkungan melalui pelatihan yang dilakukan aktivis lingkungan.

Civic Engagement merupakan salah satu konsep utama dalam *community civic* yang menekankan pada keterlibatan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan (Syaiyfullah, 2015). Akan tetapi dalam menentukan atau menemukan istilah yang sesuai mengenai *civic engagement* pada saat sekarang ini Menurut Barbara Jacoby (2009) merupakan sebuah tantangan tersendiri dikarenakan pemahaman/interpretasi yang sangat luas dan dari berbagai sudut pandang. “*There is widespread recognition that defining civic engagement presents formidable challenges*”. Pada kenyataannya memang begitu banyak istilah, definisi atau pengertian dari *civic engagement* dari sudut pandang para sarjana dan para ahli. *Civic engagement* juga disebut sebagai konsep yang kompleks dan “polyonymous” (banyak istilah). Hal ini dapat dilihat dari para sarjana dan para ahli yang menggunakan berbagai macam istilah untuk menyebutkan *civic engagement* dengan istilah (term) lain.

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Machael Rush & Philip Althoff, 1995:27).

A Thio berpendapat dalam bukunya *Sociology: an introduction*, Thio (1989:412) membuat batasan sosialisasi politik sebagai “proses dengan mana individu-individu memperoleh pengetahuan, kepercayaan, dan sikap politik.

Sedangkan dalam buku *Perbandingan Sistem Politik*, Muchtar Mas’oed dan Collin MacAndrews menyunting tulisan Gabriel A. Almond tentang sosialisasi, kebudayaan, dan partisipasi politik”. Dalam tulisan tersebut Almond mengartikan sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya.

Dalam bukunya Prof. Miriam Budiardjo sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban (Prof. Miriam Budiardjo, 2008:407).

Metode

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2021). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library reseach) yang dilakukan untuk mendapat data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah setelah semua data yang berupa informasi terkumpul, maka oleh peneliti data yang berupa informasi tersebut akan diedit terlebih dahulu guna meminimalisir kesalahan. Setelah itu data akan dikelompokkan menurut kategori masing-masing data.

Hasil dan pembahasan

Era globalisasi yang ditandai dengan keterbukaan dan ketergantungan antar negara menjadikan negara tidak mengenal batas-batasnya (borderless state) sehingga arus informasi dan telekomunikasi berkembang sangat pesat. Kompetisi antar negara semakin ketat, baik pada bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan pendidikan. Kemajuan teknologi informasi yang datang terus-menerus akhirnya berdampak pada kehidupan penduduk di seluruh dunia lewat semakin intensnya interaksi masyarakat internasional. Ideologi, kebiasaan, dan keyakinan yang berkembang di suatu negara akan mulai mempengaruhi kebudayaan yang sudah ada di negara lain. Nilai dasar ideologi bangsa yang sejak dulu menjadi tumpuan kehidupan warga negara pun perlahan mulai terkikis. Dilihat dari tingkah laku para generasi muda, gejala yang mulai mengikis nilai-nilai dasar tersebut sangat jelas terlihat. Generasi muda pun mulai meniru tingkah laku yang menjadi tren global, misalnya perilaku hidup mewah dan boros. Jika perilaku-perilaku tersebut terus dibiarkan, nilai-nilai dasar ini dapat terus menerus memudar dan kemungkinan terbesar akan hilang (Murdiono, 2014). Gaya hidup kebarat-baratan yang cenderung melemahkan nilai-nilai kearifan lokal, khususnya di Indonesia pengaruh globalisasi telah mempengaruhi aspek pendidikan yang berdampak pada pola pikir, pola sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia (Anggraeni et al., 2021).

Dalam menangkal atau meminimalisir dampak negative dari semakin berkembang pesatnya globalisasi maka Sosialisasi politik memiliki peran vital dalam meningkatkan semangat nasionalisme setiap warga negara sehingga nantinya warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya di era globalisasi secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Sosialisasi Politik harus dilaksanakan dan juga dikembangkan agar generasi muda dapat memiliki pemahaman yang memadai. Kemudian Banks (2014) berpendapat bahwa untuk membimbing peserta didik secara efektif agar menjadi warga negara yang mampu, agar reorganisasi berhasil, pengetahuan dasar harus ditransformasikan dari pengetahuan akademik mainstream menjadi pengetahuan akademik transformative.

Konsep dasar sosialisasi politik sebagai pendidikan karakter dimulai dari bagaimana pendidikan nilai bisa diterapkan. Mengenai pendidikan nilai, Hermann (dalam Winataputra & Budimansyah, 2007) menyebutkan "...value is neither taught nor cought, it is learned", yang artinya bahwa substansi nilai

tidaklah semata mata ditangkap dan diajarkan tetapi lebih jauh, nilai dicerna dalam arti ditangkap, diinternalisasi, dan dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar. Makna pernyataan tersebut mengandung arti bahwa proses belajar tidaklah terjadi dalam ruang bebas-budaya tetapi dalam masyarakat yang syarat-budaya karena kita hidup dalam kehidupan masyarakat yang berkebudayaan. Oleh karena itu memang betul bahwa proses pendidikan pada dasarnya merupakan proses pembudayaan atau enkulturasi untuk menghasilkan manusia yang berkeadaban, termasuk di dalamnya yang berbudaya. Karakter adalah watak, tabiat, ahlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai nilai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.

Pendidikan kewarganeraan dalam penerapannya di dunia pendidikan, mengajarkan mengenai nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional, sehingga penanaman nilai-nilai kewarganegaraan lewat kurikulum sangat berperan penting dalam mempersiapkan masyarakat yang memiliki nilai-nilai kewarganegaraan yang sesuai dengan tujuan kewarganegaraan. Menurut Depdiknas (2006) (dalam Sakman & Bakhtiar, 2019) nilai-nilai kewarganegaraan yang sesuai dengan tujuan kewarganegaraan, yaitu: (1) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. (2) Berpartisipasi secara cerdas dan tangguh jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Sosialisasi politik seharusnya dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral dan karakter siswa yang diwujudkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Perilaku tersebut diwujudkan sebagai cerminan warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam mewujudkan pembentukan warga negara yang berkarakter tersebut, maka PKn sebagai suatu program pembelajaran telah dilakukan melalui pedagogical development, socio-cultural development, dan political intervention. Dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, kualitas pembelajaran PKn harus sesuai dapat mengembangkan civic knowledge, civic values, dan civic skill.

Civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Materi pengetahuan kewarganegaraan terdiri dari pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, identitas nasional, pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, hak sipil dan hak politik (Malihah et al., 2020).

Civics Values (nilai-nilai kewarganegaraan), terdiri dari percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan perlindungan terhadap minoritas.

Civics skill (keterampilan warga negara), mencakup keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani (civil society), keterampilan mempengaruhi dan monitoring jalannya pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama, dan mengelola konflik.

Ketiga kompetensi yang harus dicapai melalui PKn seperti tersebut di atas, tentunya memerlukan upaya komprehensif dalam pencapaiannya. Selama ini pembelajaran PKn dalam prakteknya banyak mengarahkan siswa hanya pada aspek civic knowledge saja, sehingga upaya pembentukan karakter siswa sebagai warga negara kurang optimal. Padahal sosialisasi politik seyogyanya bukan hanya sebagai proses pendidikan berpikir tetapi juga pendidikan nilai dan watak serta perilaku karena

pendidikan nilai, watak serta perilaku sangat menunjang dalam membentuk karakter bangsa. Dalam mencapai tujuan pendidikan watak dan perilaku tersebut diperlukan upaya pembiasaan melalui internalisasi dan aplikasi dari civic knowledge, civic values maupun civic skill. Siswa dituntut untuk belajar tidak hanya dikelas tetapi dituntut untuk bisa menerapkan ketiga kompetensi yang diperolehnya melalui pengalaman nyata yang dipraktekkan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada dilingkungannya. Ketiga kompetensi tersebut akan sinergis dapat dicapai apabila setiap individu sebagai warga negara sudah memiliki civic engagement yang tercermin dalam kehidupan komunitasnya.

Dalam konteks perkembangan sosialisasi politik global, di Indonesia sendiri nilai-nilai yang dikembangkan lebih merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Karena semua nilai yang ada dalam Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan sosialisai politik global di Indonesia. Mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, hingga nilai-nilai kerakyatan dan keadilan, semuanya bisa menjadi tumpuan dalam hubungan internasional. Nilai-nilai Pancasila pun dapat dijadikan sebagai prasyarat bagi warga Indonesia sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. (Murdiono et al., 2014)

Dalam membangun visi global warga negara yang berdasarkan nilai Pancasila, ada dua hal yang cukup esensial yang harus dipahami, yaitu kita harus bisa memahami Pancasila sebagai konten dan memahami Pancasila sebagai tingkah laku dan tindakan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus memiliki pemahaman yang benar mengenai Pancasila, dan juga mencerminkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya tidak hanya mengingat nilai-nilai Pancasila atau dijadikan moto, tetapi juga menerapkan dan mengimplementasikannya pada kegiatan sehari-hari. (Murdiono et al., 2014) Selain itu, nilai-nilai konstitusional dalam konstitusi negara harus dijadikan acuan dalam pelaksanaan sosialisasi politik global di Indonesia. Dalam konstitusi negara Indonesia, terlihat secara nyata bahwa terdapat nilai-nilai hubungan antar negara. Seperti halnya pada pembukaan UUD 1945, disana dengan gamblang disebutkan bahwa tujuan tunggal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk “ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu jelas bahwa Konstitusi kita memberikan kesempatan untuk mengembangkan nilai-nilai hubungan antar bangsa, termasuk nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Selanjutnya Morais dan Ogden (2011) menemukan berbagai aspek kewarganegaraan global yang bisa dikembangkan ketika mempelajari sosialisasi politik di sekolah. Peserta didik berlatih dan belajar bersama guru serta teman untuk meningkatkan dimensi kewarganegaraan global sehingga mereka siap untuk menjadi masyarakat global yang cerdas serta berkarakter. Kewarganegaraan global biasanya melibatkan tiga aspek utama yaitu tanggung jawab sosial, kompetensi dan partisipasi warga global. Ketiga aspek kewarganegaraan global dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, tanggung jawab sosial (social responsibility) diartikan sebagai tingkat pemahaman akan kesalingtergantungan serta kepedulian sosial terhadap orang lain, masyarakat dan lingkungan. Peserta didik bisa mempraktikkan pengembangan tanggung jawab sosial dengan berpartisipasi dalam menilai suatu permasalahan sosial dan mengidentifikasi suatu kasus atau contoh ketidakadilan dan ketidaksetaraan global. Tidak hanya sampai disitu, peserta didik bisa berlatih menghargai perbedaan dan membangun layanan sosial untuk menyelesaikan masalah dan memahami hubungan antara perilaku global dan lokal. Peserta didik selanjutnya akan menyadari jika di era globalisasi ini, mereka akan berjumpa serta berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki latar belakang berbeda. Perbedaannya tidak hanya pada budaya suatu negara, tetapi juga lintas negara (transnasional). Sebagai warga global, peserta didik berlatih untuk memiliki sikap tanggung jawab sosial yang dibutuhkan di era global. Mempelajari beberapa isu penting dalam pembelajaran kewarganegaraan, seperti keadilan dan kesenjangan global, simpati dan kepedulian, tanggung jawab pribadi, dan keterkaitan global dapat

digunakan dalam pengembangan aspek tanggungjawab sosial. Melalui pembelajaran dialog, rasa tanggung jawab mereka sebagai warga negara dikembangkan. Peserta didik juga harus dapat mempertanggungjawabkan semua tindakan yang dijalankan, baik secara lokal maupun global.

Kedua, kompetensi global (*global competence*) didefinisikan sebagai keterampilan untuk mempunyai pikiran terbuka dan dengan bersungguh-sungguh berusaha untuk mempelajari norma budaya lain dan menggunakan wawasan yang dimiliki untuk berinteraksi, berkomunikasi dan bekerja secara efektif. Peserta didik juga perlu memiliki kemampuan global dalam menghadapi dunia yang berubah dengan cepat, karena sebagai warga negara muda, peserta didik mempunyai banyak peluang dalam belajar dan berlatih untuk mengembangkan pengetahuan global. Dalam hal ini, metode berpikir kritis dapat digunakan untuk mengembangkan dimensi kompetensi global dalam pembelajaran PKn.

Ketiga, partisipasi dalam kewarganegaraan global (*global civic engagement*) dipahami sebagai perilaku dan / atau tren yang memahami masalah sosial di tataran lokal, regional, nasional, dan global, yang dapat dilaksanakan melalui layanan sukarela, kegiatan politik, dan adanya kontribusi masyarakat untuk merespons. Warga negara muda haruslah mengembangkan kemampuan mereka sendiri dan ikutserta secara aktif dalam mengenali dan memecahkan masalah global yang beragam. Partisipasi dalam kehidupan sipil merupakan bagian penting dari modal sosial.

Ketiga dimensi global yang sudah disebutkan tersebut merupakan nilai yang mendasar untuk ditingkatkan dalam sosialisasi politik global. Karena pada akhirnya melalui sosialisasi politik ini, peserta didik akan memperoleh keterampilan hidup yang kelak akan berguna bagi kehidupan sosialnya. Tanggung jawab sosial, kemampuan menjadi warga dunia dan keterampilan berpartisipasi dalam kegiatan politik merupakan komponen penting yang harus dikembangkan.

Di era globalisasi yang terus berkembang, sosialisasi politik tidak diragukan lagi dalam menjadi poros utama untuk membina warga global. Setiap warga negara di dunia memiliki beberapa karakteristik yang harus terlihat, dan karakteristik tersebut harus tercermin. Ciri-ciri tersebut menurut John C. Cogan (dalam Iswanda & Dewi, 2021) meliputi beberapa kemampuan, diantaranya memiliki kemampuan dalam mengenali dan memecahkan masalah sebagai warga global, mampu bekerjasama dengan orang lain dan menjalankan peran atau kewajibannya sendiri sebagai anggota masyarakat, mampu memahami, menerima, dan menghargai perbedaan budaya, mampu berpikir kritis dan sistematis, mampu menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan, mampu mengubah gaya hidup, memiliki kepekaan dan membela hak asasi manusia (seperti hak perembuan, dll), mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik dalam berbagai tingkatan. Karakter seperti inilah yang harus terus dikembangkan oleh warga negara global dan ditingkatkan dalam setiap proses pembelajaran, sehingga potensi warga global dapat dikembangkan di semua jenjang pendidikan, dan dapat berpartisipasi dalam menyelesaikan berbagai masalah dan konflik dalam skala global, serta tantangan global. Dengan demikian akan tercipta tatanan kehidupan manusia yang beradab, adil dan sejahtera dalam masyarakat global. (Asafiq, 2018).

Simpulan

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi Politik mempunyai tugas untuk mengembangkan kompetensi *civic knowledge*, *civic values*, dan *civic skill*. Melalui Pendidikan Kewarganegeraan, akan membangun, membentuk, dan membina karakter generasi muda sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa sesuai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan sosialisasi politik membentuk masyarakat yang baik, Ketiga kompetensi tersebut akan sinergis dapat dicapai apabila setiap individu sebagai warga negara sudah memiliki *civic engagement* yang tercermin dalam kehidupan komunitasnya sebagai salah satu dasar pegangan dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional di era globalisasi.

Referensi

- Anggraeni, L., Darmawan, C., & Tanszil, S. W. (2020). *The Use of Comic-Based Technology: Media Cultivation of Values in the Nation Defense*. 418(Acec 2019), 428–431. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.081>
- Anggraeni, L., Darmawan, C., Tanszil, S. W., & Jubaedah, E. (2021). Promoting Ksatria Bela Negara comic through the Webtoon for the prevention and control Covid-19. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 138–147. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.39377>
- Asafiq, S. (2018). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Warga Negara Global. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 41.
- Prabotinggi, Mochtar. (1993). Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Banks, J. A. (2014). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Journal of Education*, 194(3), 1–12.
- Iswanda, M. L., & Dewi, D. A. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1494–1500.
- Jacoby, B. (2009). *Civic engagement in higher education: Concepts and practices*. John Wiley & Sons.
- Juliati, J., Hermawan, W., & Firman, M. (2019). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana untuk meningkatkan kesadaran hidup yang lebih baik bagi sesama. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(1), 29–37.
- Malihah, E., Nurbayani, S., & Anggraeni, L. (2020). Why is There Zero Women Candidate for Governor Election in West Java, Indonesia? *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.21373>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Morais, D. B., & Ogden, A. C. (2011). Initial development and validation of the global citizenship scale. *Journal of Studies in International Education*, 15(5), 445–466.
- Murdiono, M. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun wawasan global warga Negara muda. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 33(3).
- Murdiono, M., Sapriya, S., Wahab, A. A., & Maftuh, B. (2014). Membangun wawasan global warga negara muda Berkarakter pancasila. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2.
- Paramitha, S. T., Hasan, M. F., Anggraeni, L., Noviyanti, M., Iلسya, F., Gilang Ramadhan, M., Maharani, A., & Kodrat, H. (2021). Analysis and evaluation of law number 12 of 2012 concerning higher education based on sports needs for students. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 191–199. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/42249>
- Sakman, S., & Bakhtiar, B. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan dan Degradasi Moral di Era Globalisasi. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 14(1), 1–8.
- Saltmarsh, J., & Zlotkowski, E. (2011). *Higher education and democracy: Essays on service-learning and civic engagement*. Temple University Press.
- Syaifullah. (2015). *Pemberdayaan Generasi Muda Sebagai Dasar Filosofis Dari Keterlibatan Warganegara (Civic Engagement): Tinjauan Tentang Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), dalam "Penguatan Komitmen Komunitas Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKN."*
- Winataputra, B., & Budimansyah, D. (2007). Civic Education Konteks. *Landasan, Bahan Ajar Dan Kultur Kelas, Prodi PKN UPI*.
- Yustitiantingtyas, L. (2015). Masyarakat dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis terhadap perubahan- perubahan Sosial Dalam Masyarakat Internasional). *Perspektif*, 20(2), 90–100.